

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Aurelia Anastasya*, Lince Magriasti

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Sistem pemerintahan bergantung pada partisipasi politik. Meski demikian, tidak semua masyarakat dilibatkan dalam aktivitas politik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu dengan tingkat tidak ikut serta sebesar 20,42%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan diantaranya jumlah pemilih laki-laki berada di bawah jumlah partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu, kurangnya sosialisasi tentang pemilu kepada pemilih, dan terdapat pemilih yang tidak memiliki informasi serta tidak paham tentang politik. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat Masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan terdiri dari tiga aspek, yaitu tingkat partisipasi pemilih, kesadaran politik, keterlibatan dalam proses pengambilan Keputusan. Terdapat faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilih yaitu, faktor teknis yang bersifat operasional dan administratif, serta faktor ekonomi masyarakat. Faktor eksternal yang mempengaruhi meliputi, Faktor administrasi menyangkut data masyarakat, Faktor sosialisasi yang umumnya serta Faktor Politik menyangkut suasana politik menjelang pemilu.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Partisipasi Masyarakat, Pilpres, Pemilu 2024

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2475>

*Correspondence: Aurelia Anastasya

Email: aureliaanastasya2@gmail.com

Received: 25-04-2025

Accepted: 25-05-2025

Published: 25-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The system of government relies on political participation. However, not all citizens are involved in political activities. There are several factors that influence the level of political participation. In the Sangir District of Solok Selatan Regency, the level of community participation in elections has a non-participation rate of 20.42%. Some of the issues include the number of male voters being lower than the number of female voters in elections, a lack of socialization about elections to voters, and the presence of voters who do not have information and do not understand politics. This indicates that there are still members of the community who do not participate in politics. This type of research is qualitative with a descriptive method, using data collection techniques such as interviews and document studies. The selection of informants uses purposive sampling techniques, and the data analysis technique used in this study includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study show that the forms of political participation of the community in Sangir District, Solok Selatan Regency consist of three aspects: the level of voter participation, political awareness, and involvement in the decision-making process. There are internal factors that influence community political participation, namely technical factors that are operational and administrative in nature, as well as the economic factors of the community. External factors that influence participation include administrative factors related to community data, socialization factors in general, and political factors concerning the political climate leading up to the elections.

Keywords: Political Participation, Public Participation, Presidential Election, 2024 Election

Pendahuluan

Herbert Mc Closky dalam pandangannya, mendefenisikan partisipasi politik sebagai bentuk aktivitas dari warga negara secara sukarela untuk ikut dalam pemilihan pemimpin serta pembentukan kebijakan publik. Partisipasi ini meliputi kegiatan seperti memberikan hak suara atau ikut serta dalam pelaksanaan pemilu, seperti pemilihan Eksekutif (presiden dan wakil presiden, legislative, maupun kepala daerah. Pemberian suara dalam pemilu merupakan suatu hak fundamental bagi seluruh warga negara Indonesia yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Munif, 2019).

Pemilihan Umum (PEMILU) adalah pesta demokrasi yang dilakukan serentak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hal ini telah diatur pada Undang-undang No. 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Kegiatan dalam Pemilu adalah memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengeluarkan hak suaranya dalam menentukan pilihan yang akan memimpin sebuah negara maupun daerah. Ramlan Surbakti mengemukakan partisipasi politik masyarakat dalam konteks pentingnya keterlibatan warga dalam proses demokrasi. Partisipasi politik tidak selalu berkaitan dengan pemungutan suara, tetapi juga keterlibatan aktif dalam diskusi publik dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Indikator partisipasi politik masyarakat mencakup berbagai aspek, seperti tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu, kesadaran politik, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

Sistem pemerintahan bergantung pada partisipasi politik, karena keterlibatan ini memengaruhi tidak hanya kemajuan politik negara, tetapi juga stabilitas hukum dan ekonomi, yang semuanya berhubungan dengan masyarakat sebagai tujuan dan sasaran utama pembangunan beberapa sektor ini. Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keterlibatan politik masyarakat adalah partisipasi politik, yang dapat diukur dengan menghitung jumlah atau persentase masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya dibandingkan dengan total penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, ini dapat menunjukkan bagaimana tingkat partisipasi politik dalam pemilu (Prasetyo et al, 2019).

Meski demikian, tidak semua warga negara terlibat dalam aktivitas politik. Terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Menurut Surbakti (1992), salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap politik dan pemerintah. Mencakup pemahaman hak dan tanggung jawab yang melekat sehingga harus dipenuhi sebagai warga negara serta penilaian terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, kepercayaan terhadap politik juga memiliki peran penting yang mencakup tingkat pengetahuan dan keyakinan masyarakat terhadap informasi politik yang mereka terima. Sikap masyarakat yang menunjukkan suka atau tidak suka juga secara tak langsung turut memengaruhi secara signifikan keterlibatan pada politik. Status sosial dan ekonomi juga turut berperan, di mana kelompok dengan status perekonomian rendah cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (Sedho, Maria & Toulwala, Richardus, 2025).

Menurut Mas“oed (Jannah, 2023) Partisipasi politik warga negara terkait dengan demokrasi, karena konsep dasar dari demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu aspek dari rakyat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam mekanisme pengambilan keputusan politik, seperti memilih dan menunjuk anggota legislatif dan eksekutif negara, yang merupakan ruang yang diciptakan oleh negara untuk menjalankan pemerintahan.

Sumatera Barat adalah satu dari banyak daerah yang memiliki jumlah DPT yang cukup besar, dan juga memiliki persentase pemilih yang cukup tinggi. Pada saat pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 tercatat total DPT berjumlah 3.128.346 pemilih, dan yang menyalurkan hak pilih sebanyak 3.085.400. Berdasarkan data tersebut tercatat bahwa terdapat 42.946 yang tidak menyalurkan hak pilihnya. Angka tersebut sudah menurun dari tahun 2019, yaitu 1 juta pemilih tidak menggunakan hak pilih. Hal ini menandakan adanya peningkatan dari partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan umum. Namun, dengan masih terdapatnya DPT yang tidak menyalurkan hak pilih merupakan salah satu bentuk ketidaktahuan dan tidak kepedulian masyarakat terhadap pemilu.

Sejumlah alasan yang mengubah partisipasi politik, seperti kesadaran politik, kepercayaan politik, sikap dan status sosial-ekonomi yang tidak hanya berlaku secara umum, tetapi juga dialami oleh masyarakat tingkat lokal, termasuk di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 di Kecamatan Sangir, tercatat jumlah pemilih tetap yang tercatat dalam DPT Kecamatan Sangir adalah sebanyak 34.932 orang dengan komposisi 17.652 pemilih tetap laki-laki dan 17.280 pemilih tetap perempuan. Jumlah pemilih tetap yang hadir dan menggunakan hak pilih dalam pemilu sebanyak 27.798 orang, dengan komposisi pemilih dari kalangan laki-laki 13.621 dan pemilih dari kalangan perempuan 14.177. Sedangkan warga yang tidak mengikuti dan menggunakan hak pilihnya sebanyak 7.134 orang, dengan komposisi 4.031 pemilih laki-laki dan 3.103 pemilih perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang mempresentasikan data pemilih tetap dan pemilih yang menyalurkan hak suaranya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan, sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Kec.Sangir 2024

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT	17.652 (50,53%)	17.280 (49,46%)	34.932 (100%)
Pemilih pada salinan DPT yang ikut serta dalam pemungutan suara	13.621 (49%)	14.177 (51%)	27.798 (79,58%)
Pemilih pada Salinan DPT namun Tidak menyalurkan Hak Pilih	4.031 (56,50%)	3.103 (43,50%)	7.134 (20,42%)

(Sumber : KPU Solok Selatan, 2024)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa partisipasi masyarakat pada pemilu dengan tingkat ketidakikutsertaan sebesar 20,42%. Angka ini menjelaskan terdapat indikator adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih mereka. Selain itu, dapat diketahui juga bahwasannya pada pemilu 2024 di Kecamatan Sangir jumlah partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi dengan total 51% di bandingkan jumlah partisipasi pemilih laki-laki dengan total 49%. Kondisi tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat apatisme masyarakat terhadap pemilu.

Keengganan masyarakat untuk memilih, yang ditunjukkan dengan prioritas pada pekerjaan, merupakan bentuk apatisme yang didasari oleh kekecewaan dan hilangnya kepercayaan terhadap proses demokrasi. Salah satu penyebab masih terdapatnya warga negara yang masih belum menggunakan hak pilihnya adalah karena kurangnya sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi yang berwenang secara langsung kepada masyarakat menjelang pemilu. Ketidakmerataan sosialisasi bisa menjadi factor penyebab pemilih tidak menyalurkan hak pilihnya pada pemilu. Masalah ini kemungkinan terjadi pada pemilih yang sebenarnya seharusnya berpartisipasi dalam kegiatan politik, tetapi terhalang oleh kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan bahwa partisipasi hak pilih dalam pemilu itu sangat penting.

Berdasarkan uraian tersebut tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tingkat partisipasi politik masyarakat dan menganalisis faktor yang menyebabkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini diharap mampu berpengaruh signifikan kepada pemerintah untuk lebih optimal dalam melaksanakan sosialisasi pemilu kepada masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

Metodologi

Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis tingkat Keterlibatan Masyarakat pada Politik pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Lokasi Penelitian ini di Kecamatan Sangir. Informan pada studi ini ditentukan melalui metode dan teknik purposive sampling yang melibatkan Ketua dan Staff KPU, Ketua DPC Gerindra, serta masyarakat. Dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara serta studi dokumentasi sementara data sekunder didapatkan melalui telaah pustaka yang akan dianalisis dengan metode pengumpulan, reduksi dan penyajian data serta pengambilan untuk memastikan kebenaran data diuji melalui metode triangulasi teknik dan sumber.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat

Terdapat berbagai bentuk partisipasi politik masyarakat di berbagai negara yang terjadi pada periode waktu tertentu yang dipengaruhi oleh kepedulian masyarakat terhadap politik. Dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu Bentuk-bentuk partisipasi warga dalam proses politik, baik konvensional dan non-konvensional.

Partisipasi tersebut bisa berupa aktivitas yang legal, seperti pengajuan petisi, maupun tindakan yang ilegal, kekerasan, atau revolusioner. Frekuensi berbagai bentuk partisipasi politik ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai stabilitas sistem politik, kualitas kehidupan politik, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

P.Huntington, Joan Nelson dan Gabriel Almond, memaparkan beberapa teori ragam bentuk partisipasi politik. Dalam sistem politik, bentuk partisipasi politik masyarakat terbagi ke dalam berbagai tingkatan yang menggambarkan cara dan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses politik (Saputra, Alief, 2021). Berikut ini bentuk tabel dan tingkat partisipasi politik :

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Politik

Bentuk	Ruang Lingkup	Derajat
Pemberian suara	Luas, Keputusan pemerintah	Sedang
Kelompok informal dan pergerakan sosial	Aktifitas kolektif, kebijakan umum.	Tinggi
Kontak langsung	Spesifik, urusan personal/pribadi	Rendah
Penolakan	Ekspresif, urusan spesifik	Tinggi

(Sumber : Sahid, Memahami Sosiologi Politik:Ghalia Indonesia 2011, hal 179)

Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada aktivitas memberikan suara dalam pemilihan umum saja, melainkan memiliki berbagai bentuk dan jenis yang berbeda, tergantung pada perspektif atau pendekatan analisis yang digunakan dalam melihat bentuk keterlibatan tersebut.

Ramlan Surbakti (1999) mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas masyarakat yang diarahkan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Bentuk partisipasi politik seseorang dapat di lihat dari kegiatan-kegiatan politiknya. Bentuk partisipasi politik individu dapat di lihat dari kegiatan-kegiatan politiknya. Adapun bentuk peran serta masyarakat dalam pemilu dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut.

Pertama, Tingkat keikutsertaan pemilih tetap, pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 masih terdapat masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pemilu atau disebut dengan golput. Berdasarkan DPT tingkat partisipasi warga Kab. Solok pada kontestasi politik nasional pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan masih terdapat masyarakat yang tergolong Ketidakikutsertaan pemilih dalam menggunakan hak pilih pada proses pemilihan umum dengan jumlah 20,42% dari keseluruhan daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan oleh beberapa penyebab seperti tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mulai menurun. Tingkat perekonomian yang rendah ditandai dengan masyarakat memilih untuk pergi bekerja dari pada pergi mencoblos. Kemudian, Partisipasi pemilih laki-laki yang mulai menurun.

Pemilih yang masih kurang paham akan informasi pemilu serta belum optimalnya kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait dengan kegiatan pemilu kepada masyarakat secara umum. Tingginya antusiasme partisipasi pemilih perempuan itu didasari oleh adanya harapan besar terhadap pemerintahan yang baru. Selain itu, pemilih perempuan di Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan juga lebih memiliki kesadaran politik yang tinggi dibandingkan dengan pemilih laki-laki. Hal ini disebabkan pemilih perempuan lebih antusias mengikuti perkembangan pemilu melalui media sosial serta mau berpartisipasi pada kegiatan yang di dalamnya terdapat sosialisasi pemahaman tentang pemilu seperti kegiatan kampanye.

Kedua, Kesadaran Politik, berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan kesadaran politik adalah terdapat beberapa bentuk partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2024. Salah satu dari wujud kesadaran politik adalah partisipasi politik dalam kegiatan pemilu. Kesadaran politik mendorong masyarakat untuk mencari informasi tentang proses pemilu, kandidat yang bertarung, visi misi mereka, serta isu-isu yang sedang diperdebatkan. Informasi ini menjadi dasar untuk membuat pilihan yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Tingkat kesadaran politik meliputi pemahaman masyarakat tentang isu-isu politik serta kegiatan pemerintahan juga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat pada kegiatan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Tingkat kesadaran diri untuk peduli dengan politik merupakan salah satu bentuk aspek dalam partisipasi politik masyarakat. Tingkat kesadaran diri ini berbeda-beda, semakin tinggi kesadaran politik masyarakat maka partisipasi politik juga akan baik. Untuk itu perlu diadakannya kerjasama dari pemerintah, partai politik serta masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kesadaran politik agar tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap politik menurun. Sehingga kedepannya keikutsertaan masyarakat dalam pemilu dapat lebih meningkat dan angka yang tidak menggunakan hak pilihnya semakin berkurang.

Ketiga, keikutsertaan dalam tahapan pengambilan keputusan, keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan merupakan bentuk lain partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan dalam hal keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan diwujudkan melalui penggunaan hak pilih dalam pemilu. Selain itu, masyarakat yang mau berpartisipasi dalam kegiatan kampanye juga secara tidak langsung dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui kegiatan kampanye masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya sehingga partai dapat menyampaikan kepada wakil-wakilnya di parlemen. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga bisa melalui aktif dalam kegiatan kampanye. Melalui kampanye masyarakat juga bisa menitipkan aspirasinya kepada calon pemimpin yang ikut berkompetisi dalam pemilu. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik berupa menyuarakan pendapatnya dan berbagi informasi melalui media sosial.

Faktor-faktor yang Berperan dalam Partisipasi Politik

Ramlan Surbakti (1992), menyebutkan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang, yaitu:

- 1) Aspek kesadaran politik masyarakat terhadap pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik mengacu pada pemahaman dan penghayatan individu terhadap hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara. Contohnya meliputi hak politik, hak atas perlindungan hukum, serta kewajiban sosial yang harus dipenuhi, dll.
- 2) Evaluasi persepsi publik bersama dengan pengawasan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintah.

Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi. Artinya, tinggi rendahnya sebuah partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa faktor lain, yaitu status ekonomi dan status sosial, pengalaman organisasi. Faktor status sosial yang di maksud adalah keadaan individu dalam masyarakat berdasarkan pendidikan, keturunan, dan pekerjaan. Faktor status ekonomi yang di maksud adalah keadaan individu dalam masyarakat berdasarkan kekayaan yang dimilikinya, seperti pendapatan, pengeluaran, atau barang yang berharga. Individu yang memiliki status ekonomi dan status sosial yang tinggi berkemungkinan memiliki pengetahuan politik yang tinggi, selain itu juga memiliki minat politik dan perhatian yang tinggi, serta memiliki kepercayaan kepada pemerintah.

Menurut Frank Lindenfeld (Rush, 2008) menjelaskan bahwa faktor utama yang memotivasi seseorang untuk berpartisipasi dalam proses politik adalah tingkat kepuasan terkait aspek ekonomi. Dalam penelitiannya, Lindenfeld mengemukakan bahwa rendahnya status ekonomi menyebabkan individu merasa terasing dari kehidupan politik, sehingga menimbulkan sikap apatis. Kondisi ini berbeda pada individu yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Teralienasi ini berarti keterasingan dari aktivitas politik yang akhirnya membuat seseorang bersikap apatis terhadap politik. Selain itu, terdapat dua indikator yang menjelaskan pola partisipasi politik, yaitu :

- 1) Kesadaran politik adalah pengetahuan individu terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan sosial dan politik, serta minat dan perhatian terhadap kondisi masyarakat dan kehidupan politik di sekitarnya.
- 2) Kepercayaan politik adalah penilaian subjektif seseorang terhadap pemerintah serta sistem politik yang sedang berlangsung, termasuk sejauh mana pemerintah dan kebijakannya dapat dipercaya serta mampu dipengaruhi oleh masyarakat.

Menurut Eep Saefullah Fatah terdapat faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat yaitu:

1. Faktor Internal

Terdapat dua faktor yang berasal dari individu pemilih dan menjadi alasan untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih pada pemilu.

a) Faktor Teknis

Faktor teknis dalam partisipasi politik masyarakat merujuk pada hal-hal yang bersifat operasional dan administratif yang dapat menghalangi seseorang untuk

menggunakan hak pilihnya. Faktor-faktor ini seringkali menjadi penyebab Golongan Putih (Golput) teknis. Faktor-faktor ini berkaitan dengan infrastruktur, sistem, dan alat yang digunakan dalam proses politik, terutama dalam konteks pemilu. Faktor teknis di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan tidak menimbulkan permasalahan yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024. Dalam hal infrastruktur serta operasional sudah dilengkapi oleh KPU selaku instansi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pemilu.

b) Faktor Ekonomi

Pendidikan sering kali berkorelasi dengan status ekonomi. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi lebih cenderung memahami isu-isu politik dan lebih mungkin untuk berpartisipasi. Pendidikan juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi politik. Kondisi ekonomi yang buruk atau ketidakadilan ekonomi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat partisipasi.

Faktor ekonomi memiliki pengaruh dalam partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan. Masyarakat yang memiliki pekerjaan yang bagus seperti pegawai yang tentu sudah memiliki pendidikan tinggi merupakan salah satu golongan masyarakat yang berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Selain itu, masyarakat yang memiliki pekerjaan seperti pengusaha ataupun masyarakat yang pekerjaannya berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah seperti petani memiliki motivasi yang baik untuk berpartisipasi dalam politik. Mereka memiliki tujuan untuk melindungi atau memajukan kepentingan yang mereka miliki.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal pada partisipasi politik masyarakat merupakan kondisi, pengaruh, dan kekuatan yang berasal dari luar individu itu sendiri yang dapat memengaruhi keterlibatan mereka dalam proses politik. Terdapat tiga faktor yang eksternal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilu:

a) Faktor Administrasi

Faktor administrasi dalam partisipasi politik masyarakat berkaitan dengan sistem dan mekanisme pengelolaan administrasi pemerintahan yang dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Administrasi yang transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan akses informasi serta pelayanan kepada masyarakat mendorong partisipasi politik yang lebih tinggi. Sebaliknya, administrasi yang birokratis dan tertutup menimbulkan ketidakpercayaan dan apatisme masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan. Tidak terdapat kendala-kendala pada faktor administrasi yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Dalam hal ini KPU sudah menugaskan pantarlih dan bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya untuk memperbaharui kebutuhan administrasi berupa data-data

masyarakat yang akan digunakan sebagai salah satu syarat agar bisa berpartisipasi pada pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu 2024, belum terdapat keluhan dari masyarakat terkait kendala administrasi.

b) Faktor Sosialisasi

Faktor sosialisasi merupakan proses berkelanjutan dimana masyarakat dapat membentuk pandangan politik individu dan memengaruhi tingkat serta bentuk partisipasi mereka dalam kehidupan politik masyarakat. Melalui sosialisasi politik, masyarakat belajar mengenal sistem politik, membentuk persepsi, sikap, dan orientasi politik yang akhirnya mempengaruhi keputusan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilu. Sosialisasi politik meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya berpartisipasi dalam proses politik secara aktif dan bertanggung jawab tanpa adanya paksaan atau praktik politik uang.

Pada faktor sosialisasi masyarakat Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan pada pemilu 2024, umumnya mendapatkan pendidikan politik melalui kegiatan kampanye yang diberikan oleh partai-partai politik. Selain menyampaikan visi, misi serta memperkenalkan calon yang berkontestasi pada pemilu, partai politik akan memberikan sosialisasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain itu, KPU juga memiliki program sosialisasi melalui program kunjungan ke sekolah menengah atas yang ditujukan kepada pemilih pemula.

Namun, KPU pada pemilu 2024 belum melakukan sosialisasi secara optimal kepada masyarakat luas. Melalui sosialisasi masyarakat dapat mempelajari tentang politik. Kegiatan ini membutuhkan kerjasama dari seluruh aspek baik itu pemerintah melalui instansi terkait, partai politik yang ikut berkontestasi dalam pemilu serta kesadaran diri atau kepedulian masyarakat terhadap politik.

c) Faktor Politik

Dalam Partisipasi politik masyarakat, faktor politik memegang peranan yang sangat signifikan. Faktor-faktor ini dapat mendorong atau menghambat keterlibatan warga negara dalam proses politik. Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam studinya tentang budaya politik, menekankan bahwa struktur politik yang partisipatif dan responsif akan mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Sistem politik yang memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan terlibat dalam pembuatan kebijakan akan menstimulasi partisipasi.

Berdasarkan hasil temuan, faktor politik juga mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pemilu. Mudahnya akses masyarakat dalam memperoleh informasi terkait perkembangan politik serta pemerintahan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat yang mudah terpengaruh terkait hal-hal negatif yang beredar akan menilai apapun yang dilakukan oleh politisi atau aktor pemerintahan itu jelek. Hal tersebut akan menyebabkan masyarakat bersikap apatis dan tidak mau berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau memilih untuk Golput.

Sistem politik yang demokratis, responsif, dan adil, didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan elite politik, serta adanya regulasi yang kondusif, akan mendorong tingkat partisipasi yang tinggi. Sebaliknya, sistem yang represif, korup, atau tidak efektif akan menghasilkan apatisme dan rendahnya partisipasi. Selain itu, persepsi masyarakat tentang efektivitas partisipasi mereka juga menjadi kunci penting dalam memotivasi keterlibatan dalam proses politik.

Berdasarkan pemaparan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasannya terjadinya golput pada masyarakat disebabkan oleh beberapa penyebab seperti tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mulai menurun. Pemilih yang masih kurang paham akan informasi pemilu serta belum optimalnya kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait dengan kegiatan pemilu kepada masyarakat secara umum. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi lainnya dapat menciptakan kelompok masyarakat yang kurang memiliki kapasitas atau motivasi untuk terlibat dalam politik. Apabila sistem yang dirancang dengan baik secara teknis akan meminimalkan hambatan dan mendorong partisipasi yang lebih luas dan inklusif.

Simpulan

Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan yaitu terdiri dari tiga aspek. Pertama Tingkat partisipasi pemilih, dalam hal ini masih terdapat masyarakat yang memilih golput pemilu 2024. Partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pemilih laki-laki. Kedua Kesadaran politik, setiap individu dalam masyarakat memiliki bentuk pemahaman yang berbeda-beda terhadap politik, ada masyarakat yang memiliki pemahaman serta kepedulian serta terdapat masyarakat yang bersikap apatis atau acuh tak acuh. Ketiga Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan melalui berbagai kegiatan seperti berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya dalam proses pemungutan suara pada pemilu, mengikuti kegiatan kampanye serta memanfaatkan pemanfaatan media sosial. Aspek yang Mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan yaitu Aspek Internal yang terdiri dari faktor teknis yang bersifat operasional dan administratif, dan faktor ekonomi masyarakat. Faktor Eksternal yang terdiri dari Faktor administrasi berkaitan dengan sistem dan mekanisme pengelolaan administrasi pemerintahan menyangkut data masyarakat. Faktor sosialisasi yang umumnya didapatkan melalui kegiatan kampanye dan program KPU, serta Faktor Politik menyangkut keadaan pemerintah dan suasana politik menjelang pemilu. Perlu adanya kerjasama dari seluruh aspek baik itu pemerintah melalui instansi terkait, partai politik yang ikut berkontestasi dalam pemilu untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada seluruh masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

Daftar Pustaka

- Afrizal, (2016), Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers
- Agus, A, A., Badaruddin, S., Muhkam, M. F., & Umalia, A. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019-2024 (Studi Pada Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM). *SUPREMASI J Pemikiran, Penelit Ilmu-ilmu Sos Huk dan Pengajarannya*.2020;15(2):112-120.
- Budiarjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Cholisin et al., (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Eviany, E. (2019). *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*. Bandung: Cendekia Press.
- Hungtington, S. P. & Nelson, J. (1944). *Partisipasi Politik di Negara berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ihromi. Kajian Wanita dalam Pembangunan. Published online 1995.
- Jannah, M. (2023). Analisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus Desa Lheue. Kec. Indrapuri. Kab. Aceh besar) (*Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry*)
- Munif, A. (2019). Analisis Politik Partisipasi Pemuda Adalam Pemilu 2019 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. *Angew Chemie Int Ed* 6(11), 951–952. Published online 2019:5-24.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). *Analisis data dan pengecekan keabsahan data*.
- Pelitawati, N. U. (2014). Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah) (*Doctoral dissertation, Universitas Lampung*).
- Perdana, A, Zainuzir A, Susanto A, et al. (2024). *Indeks Partisipasi Pemilu (I P P) 2024*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; 2024.
- Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1).
- Samuel, P. Huntington, Nelson J. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Rineka Cipta; 1994.
- Saputra, A. F. (2021). Pemilu Dan Partisipasi Politik: Studi Atas Partisipasi Masyarakat Dalam Pilpres Di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi 2019. *RepositoryUinjktAcId*. Published online 2021.
- Sedho, M. F. & Toulwala, R. B. (2025). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2024 di Desa Tendambonggi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. 2025;1(1):25-31.
- Simamora. S. & Gabriel, A. A. (1984), *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Sucipto, A. (2015). Budaya politik lokal dan partisipasi politik masyarakat di desa sumber sari kecamatan sebulu dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial Mahakam*, 4(1), 31-44.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sutriani, E. & Octaviani, R. (2019). Keabsahan data. *INA-Rxiv*. Published online 2019:1-22.
- Syaputra, D. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan dalam Pemberian Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 (Studi Kecamatan Pangean). Published online 2012.
- Zalukhu, N. N. (2021). Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020).
- Zebua, W. A. (2023). Ketimpangan Gender dalam Partisipasi Politik: Tinjauan atas Faktor-Faktor Penyebabnya. *literacy notes*, 1(2).